

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tentunya harus memiliki niat dan tekad yang kuat untuk belajar dari negara-negara maju. Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara lain dalam berbagai hal dengan cara melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Tentunya dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Indonesia sebagai salah satu negara dimana pembangunan nasionalnya memiliki salah satu tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan meningkatnya pendapatan riil perkapita penduduk dalam kurun waktu yang lama disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan.² Pertumbuhan ekonomi akan diupayakan berjalan dengan terus menerus dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi menjelaskan adanya aktivitas dalam perekonomian yang menyebabkan meningkatnya produksi barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dan diikuti pula dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat diketahui melalui pendapatan domestik regional bruto. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara menunjukkan peningkatan maka menggambarkan perekonomian negara berkembang baik.

² Asnidar, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Timur", *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 2, No. 1, thn 2018, hal. 1

Sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara menunjukkan penurunan maka menggambarkan perekonomian negara berkembang buruk. Kondisi ini tentunya akan menimbulkan munculnya banyak permasalahan tak terkecuali masalah pengangguran.³

Apabila kita membicarakan masalah pertumbuhan ekonomi suatu negara tentu ada faktor yang perlu diketahui antara lain: sumber daya manusia, sumber daya alam, modal dan teknologi. Sumber daya manusia ialah faktor produksi yang penting. Dikatakan penting karena sumber daya manusia bisa melakukan dua peran dalam melakukan dua produksi untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Peran itu antara lain sebagai tenaga kerja dan sebagai pengusaha (seseorang yang mengkombinasikan seluruh faktor produksi dalam proses produksi).⁴ Manusia juga berperan menciptakan teknologi baru dan juga mengembangkannya. Dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia didorong untuk meningkatkan kualitas. Peningkatan kualitas berupa peningkatan kualitas ilmu pengetahuan, teknologi, ketrampilan dan pola pikir masyarakat.

Sumber daya alam ialah faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Hal-hal yang termasuk sumber daya alam yaitu tanah, air, udara, hewan, tumbuhan, mineral dan segala sesuatu yang ada di alam. Tanpa faktor SDA yang cukup pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi. Indonesia dari segi faktor sumber daya alam cukup memadai, akan tetapi kemampuan pemanfaatan dan

³ M Amirul Muminin dan Wahyu Hidayat R, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015", *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 1, No. 3. thn 2017, hal. 374

⁴ Eeng Ahman dan Epi Indriani, *Ekonomi dan Akuntansi: Membina Kompetensi Ekonomi*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hal. 12

pelestariannya perlu ditingkatkan agar proses pembangunan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Modal bagi suatu negara yang sedang berkembang sangat diperlukan, kekurangan modal merupakan faktor yang menghambat pembangunan. Tingkat pembentukan modal rendah di negara berkembang disebabkan karena kemampuan manusia yang rendah. Salah satunya yaitu kemampuan menabung. Kemampuan menabung yang rendah disebabkan tingkat pendapatan yang rendah. Tingkat pendapatan yang rendah disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah. Tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan rendah dan tingkat investasi rendah. Tingkat investasi rendah disebabkan karena kemampuan pembentukan modal yang rendah.⁵

Dengan semakin majunya zaman, pertumbuhan atau pembangunan ekonomi suatu negara akan tetap tertinggal jika tidak dikuasainya teknologi. Dengan teknologi proses produksi akan lebih dan akan mampu menghasilkan produk yang kualitasnya baik dengan penggunaan lebih murah. Teknologi canggih akan membantu peningkatan efektifitas dan efisiensi produksi. Oleh karena itu, teknologi memberikan nilai tambah terhadap proses pertumbuhan atau pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Penguasaan teknologi di negara berkembang masih kurang sehingga proses pembangunan ekonomi di negara berkembang juga berjalan lamban.

⁵ *Ibid.*, hal. 14

Tabel 1.1

Data Pertumbuhan Ekonomi yang diperoleh dari data pdrb menurut harga konstan 2010 pada 34 Provinsi di Indonesia (Milyar Rupiah) Periode 2020

No.	Nama Provinsi	Jumlah PDRB
1	ACEH	131.585,02
2	SUMATERA UTARA	533.746,36
3	SUMATERA BARAT	169.458,11
4	RIAU	490.024,47
5	JAMBI	148.449,87
6	SUMATERA SELATAN	315.143,01
7	BENGKULU	46.338,44
8	LAMPUNG	240.306,86
9	KEP. BANGKA BELITUNG	52.702,46
10	KEP. RIAU	174.976,70
11	DKI JAKARTA	1.792.794,59
12	JAWA BARAT	1.455.235,14
13	JAWA TENGAH	965.629,09
14	DI YOGYAKARTA	101.679,60
15	JAWA TIMUR	1.610.419,65
16	BANTEN	441.295,80
17	BALI	147.549,80
18	NUSA TENGGARA BARAT	93.269,13
19	NUSA TENGGARA TIMUR	68.806,67
20	KALIMANTAN BARAT	134.743,38
21	KALIMANTAN TENGAH	98.956,72
22	KALIMANTAN SELATAN	130.865,60

23	KALIMANTAN TIMUR	472.864,89
24	KALIMANTAN UTARA	60.743,20
25	SULAWESI UTARA	88.126,37
26	SULAWESI TENGAH	134.152,69
27	SULAWESI SELATAN	328.192,82
28	SULAWESI TENGGARA	93.446,72
29	GORONTALO	28.422,29
30	SULAWESI BARAT	32.082,45
31	MALUKU	30.765,02
32	MALUKU UTARA	27.868,47
33	PAPUA BARAT	61.592,39
34	PAPUA	137.677,57

Sumber: Data Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa provinsi yang memiliki pendapatan domestik regional bruto (pdrb) terendah adalah provinsi Maluku Utara yakni sebesar Rp 27.868,47 Milyar sedangkan provinsi yang memiliki produk domestik regional bruto tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta yakni sebesar Rp 1.792.794,59 Milyar.

Jumlah penduduk memiliki andil yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Yang dimaksud dengan penduduk adalah sejumlah manusia yang menempati suatu daerah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Melalui jumlah penduduk biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan (*income per capita*) negara tersebut, dimana secara tidak langsung dapat mencerminkan

kemajuan perekonomian negara tersebut.⁶ Meningkatnya jumlah penduduk tentunya mempengaruhi adanya tingkat pengangguran, jumlah tenaga kerja juga ikut meningkat. Angkatan kerja tentunya membutuhkan pekerjaan dan pada umumnya di negara yang sedang berkembang contohnya Indonesia laju pertumbuhan penduduk lebih besar ataupun lebih tinggi daripada laju pertumbuhan lapangan kerja. Oleh sebab itu, tidak semua tenaga kerja dapat diserap oleh lapangan kerja dan akibatnya terjadilah pengangguran. Dari sinilah perlu keterlibatan dari pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran. Jika pengangguran banyak maka, penduduk yang bekerja semakin sedikit. Jika banyak terjadi pengangguran jumlah produksi barang ataupun jasa semakin sedikit. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara ataupun daerah.

Tabel 1.2

Data Jumlah Penduduk pada 34 Provinsi di Indonesia (Ribu Jiwa)

Periode 2020

No.	Nama Provinsi	Jumlah Penduduk
1	ACEH	5.388,1
2	SUMATERA UTARA	14.798,4
3	SUMATERA BARAT	5.545,7
4	RIAU	6.951,2
5	JAMBI	3.604,2
6	SUMATERA SELATAN	8.600,8
7	BENGGKULU	1.994,3
8	LAMPUNG	8.534,8

⁶ Rosyetti, "Studi Keterkaitan Pertumbuhan Penduduk dengan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Kuantan Singingi", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17, thn 2009, hal.51

9	KEP. BANGKA BELITUNG	1.469,8
10	KEP. RIAU	2.309,5
11	DKI JAKARTA	10.576,4
12	JAWA BARAT	49.565,2
13	JAWA TENGAH	34.738,2
14	DI YOGYAKARTA	3.919,2
15	JAWA TIMUR	39.955,9
16	BANTEN	12.895,3
17	BALI	4.414,4
18	NUSA TENGGARA BARAT	5.225,9
19	NUSA TENGGARA TIMUR	5.513,4
20	KALIMANTAN BARAT	5.104,9
21	KALIMANTAN TENGAH	2.686,3
22	KALIMANTAN SELATAN	4.268,6
23	KALIMANTAN TIMUR	3.664,7
24	KALIMANTAN UTARA	708
25	SULAWESI UTARA	2.512,9
26	SULAWESI TENGAH	3.081,7
27	SULAWESI SELATAN	8.888,8
28	SULAWESI TENGGARA	2.703,5
29	GORONTALO	1.186,3
30	SULAWESI BARAT	1.378,1
31	MALUKU	1.787,1
32	MALUKU UTARA	1.252,3
33	PAPUA BARAT	986
34	PAPUA	3.393,1

Sumber: Data Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk yang paling sedikit yakni sebesar 708,4 ribu jiwa sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu provinsi Jawa Barat yakni sebesar 49.565,2 ribu jiwa. Hal ini

dapat disebabkan karena beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, sosial budaya dan fisiografis. Jika suatu daerah tergolong daerah yang maju, kondisi daerahnya aman, banyak sekali keanekaragaman budaya maka, jumlah penduduk yang menempati suatu daerah tersebut tergolong banyak.

Pengangguran terbuka adalah suatu jenis pengangguran yang tenaga kerjanya nyata-nyata tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran terbuka tergolong jenis pengangguran yang cukup banyak dikarenakan memang belum mendapatkan pekerjaan meskipun telah berusaha maksimal dan sebagai akibat dari adanya lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada tenaga kerja.⁷ Pengangguran terbuka dapat disebabkan karena akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi yang berakibat adanya pengurangan dari tenaga kerja serta karena kemunduran perkembangan suatu industri.

Masalah pengangguran adalah permasalahan pokok dan sudah pasti ada di dalam suatu daerah maupun negara. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus perpindahan penduduk yang terus mengalir serta dampak dari adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan rumit. Permasalahan-permasalahan itu juga semakin kompleks karena adanya perselisihan antara pengusaha dengan pekerja terkait dengan upah ataupun gaji, tingkat inflasi yang cenderung naik serta masalah-masalah ekonomi lainnya sehingga hal tersebut menambah pekerjaan rumah negara maupun daerah yang harus

⁷ Syamsul Arifin dan Yoyok Soesatyo, *Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Konsumsi Dalam Bingkai Kesejahteraan Masyarakat*, (Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2020) hal.24-25

segera diatasi. Dengan adanya pengangguran menyebabkan produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga akan menyebabkan timbulnya masalah kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Karena dengan menganggur masyarakat menjadi tidak memiliki pendapatan dan berakibat pula pada tingkat konsumsinya.

Tabel 1.3

Data Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 34 Provinsi di Indonesia (persen) Periode 2020

No.	Nama Provinsi	Jumlah TPT
1	ACEH	6,59
2	SUMATERA UTARA	6,91
3	SUMATERA BARAT	6,88
4	RIAU	6,32
5	JAMBI	5,13
6	SUMATERA SELATAN	5,51
7	BENGKULU	4,07
8	LAMPUNG	4,67
9	KEP. BANGKA BELITUNG	5,25
10	KEP. RIAU	10,34
11	DKI JAKARTA	10,95
12	JAWA BARAT	10,46
13	JAWA TENGAH	6,48
14	DI YOGYAKARTA	4,57
15	JAWA TIMUR	5,84
16	BANTEN	10,64
17	BALI	5,63
18	NUSA TENGGARA BARAT	4,22
19	NUSA TENGGARA TIMUR	4,28
20	KALIMANTAN BARAT	5,81
21	KALIMANTAN TENGAH	4,58

22	KALIMANTAN SELATAN	4,74
23	KALIMANTAN TIMUR	6,87
24	KALIMANTAN UTARA	4,97
25	SULAWESI UTARA	7,37
26	SULAWESI TENGAH	3,77
27	SULAWESI SELATAN	6,31
28	SULAWESI TENGGARA	4,58
29	GORONTALO	4,28
30	SULAWESI BARAT	3,32
31	MALUKU	7,57
32	MALUKU UTARA	5,15
33	PAPUA BARAT	6,8
34	PAPUA	4,28

Sumber: Data Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa yang memiliki jumlah tingkat pengangguran terbuka tergolong rendah yaitu provinsi Sulawesi Barat dengan 3,32 % sedangkan yang tertinggi yaitu provinsi DKI Jakarta dengan 10,95 %. Hal tersebut tentu menandakan bahwa banyaknya tenaga kerja di provinsi DKI Jakarta tidak seluruhnya terserap di dunia kerja sehingga menimbulkan adanya tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan pada provinsi Sulawesi Barat tenaga kerja banyak terserap di dunia kerja sehingga tingkat pengangguran terbukanya tergolong rendah.

Jumlah tanah wakaf adalah banyaknya tanah wakaf yang ada dalam suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu. Kekayaan tanah wakaf umat Islam Indonesia tergolong besar, yakni seluas 1.566.672.402 m² dengan 404.845 lokasi. Dari jumlah tersebut sebanyak 75% bersertifikat dan sekitar 10%

berlokasi strategis dan potensial untuk dikembangkan secara ekonomi.⁸ Secara umum tanah wakaf dikategorikan menjadi tiga yaitu tanah pedesaan, tanah perkotaan, dan tanah pinggir pantai. Tanah wakaf yang berada di lokasi strategis tidak semuanya harus dimanfaatkan untuk pendirian masjid, sekolah atau lahan pemakaman. Pada era sekarang, tanah wakaf juga menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lahan potensial tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif ke dalam bentuk usaha yang dapat menyerap tenaga kerja. Contohnya tanah wakaf yang dibangun usaha bisnis yang akan memperkerjakan banyak tenaga kerja. Dengan adanya bisnis tersebut akan mengurangi jumlah pengangguran. Dengan jumlah pengangguran yang berkurang tentunya sedikit membantu beban pemerintah dalam mengatasi masalah terkait tenaga kerja.

Tabel 1.4

Data Jumlah Tanah Wakaf pada 34 provinsi di Indonesia Periode 2020

No.	Nama Provinsi	Jumlah Tanah Wakaf
1	ACEH	16.550
2	SUMATERA UTARA	11.753
3	SUMATERA BARAT	5.625
4	RIAU	8.175
5	JAMBI	6.542
6	SUMATERA SELATAN	4.003
7	BENGKULU	2.337
8	LAMPUNG	13.241
9	KEP. BANGKA BELITUNG	1.248
10	KEP. RIAU	1.554

⁸ <http://bimasislam.depag.go.id?mod=publicservices&op=detail&id=38>, diakses pada 5 Januari 2021 pukul 09:53

11	DKI JAKARTA	6.740
12	JAWA BARAT	77.426
13	JAWA TENGAH	103.088
14	DI YOGYAKARTA	10.417
15	JAWA TIMUR	69.499
16	BANTEN	15.640
17	BALI	1.459
18	NUSA TENGGARA BARAT	9.618
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.307
20	KALIMANTAN BARAT	2.950
21	KALIMANTAN TENGAH	3.068
22	KALIMANTAN SELATAN	8.303
23	KALIMANTAN TIMUR	2.612
24	KALIMANTAN UTARA	489
25	SULAWESI UTARA	775
26	SULAWESI TENGAH	2.229
27	SULAWESI SELATAN	7.178
28	SULAWESI TENGGARA	1.108
29	GORONTALO	1.929
30	SULAWESI BARAT	2.980
31	MALUKU	469
32	MALUKU UTARA	313
33	PAPUA BARAT	52
34	PAPUA	287

Sumber: Siwak Kemenag RI

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa provinsi dengan jumlah tanah wakaf yang paling sedikit yaitu provinsi Papua Barat yaitu sebesar 52 sedangkan provinsi dengan jumlah tanah wakaf terbanyak yaitu provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 103.088. Faktor yang menentukan banyaknya jumlah tanah wakaf yaitu banyaknya penduduk yang memeluk agama islam, tingkat kereligiusan masyarakat dan lain-lain.

Banyak sekali penelitian dengan beberapa variabel yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dibahas secara mendalam. Dengan begitu, model penelitian baru dan penambahan variabel lain sangat perlu dilakukan agar semakin berkembang, ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya dan hasil dari penelitian bisa lebih baik lagi dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti menambahkan variabel pembeda dengan penelitian yang terdahulu. Saya tertarik dengan penambahan variabel yang berkaitan dengan syariah yaitu variabel jumlah tanah wakaf. Yang mana pembahasan variabel jumlah tanah wakaf kurang diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas saya tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Jumlah Tanah Wakaf terhadap Pertumbuhan Ekonomi Periode 2020 (Studi Kasus pada 34 Provinsi di Indonesia)”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Jumlah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap provinsi berbeda-beda.
2. Jumlah Penduduk di setiap provinsi berbeda-beda karena dipengaruhi oleh tiga faktor antara lain faktor ekonomi, sosial budaya dan fisiografis.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di setiap provinsi berbeda-beda tergantung dengan jumlah penduduk dan jumlah lapangan pekerjaan.

4. Jumlah Tanah Wakaf disetiap provinsi berbeda-beda tergantung dengan tingkat religius/ keimanan dan jumlah penduduk yang memeluk agama islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada 34 Provinsi di Indonesia?
2. Apakah tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada 34 Provinsi di Indonesia?
3. Apakah jumlah tanah wakaf berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada 34 Provinsi di Indonesia?
4. Apakah jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan jumlah tanah wakaf secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada 34 Provinsi di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan jumlah tanah wakaf terhadap pertumbuhan ekonomi pada 34 Provinsi di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi pada 34 Provinsi di Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi pada 34 Provinsi di Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh jumlah tanah wakaf terhadap pertumbuhan ekonomi pada 34 Provinsi di Indonesia.
4. Untuk menguji secara bersama-sama pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah tanah wakaf terhadap pertumbuhan ekonomi pada 34 Provinsi di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis kepada pembaca sebagai pengembangan ilmu ekonomi. Selain itu melalui penelitian ini dapat diketahui bagaimanakah jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah tanah wakaf dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Instansi Terkait (Pemerintah Indonesia)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan bagi pemerintah dalam mempertahankan ataupun meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2) Bagi akademik perpustakaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan atau wawasan baru serta media pembelajaran mengenai ekonomi. Diharapkan juga menambah literatur mengenai pembahasan peneliti terkait hal tersebut bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, khususnya jurusan ekonomi syariah.

3) Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan serta ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sehingga memberikan dukungan untuk berusaha mengembangkan imajinasi maupun daya kreatifitasnya dalam mempelajari mengenai ilmu ekonomi. Penelitian ini dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya dan sebagai acuan dalam melakukan perbandingan, perbaikan ataupun penyempurnaan kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah tanah wakaf terhadap pertumbuhan ekonomi pada 34 Provinsi di Indonesia periode 2020. Penelitian terfokus pada

variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi yang diketahui berdasarkan pendapatan domestik regional bruto menurut harga konstan 2010, variabel bebas yaitu jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah tanah wakaf. Periode data yang digunakan yaitu tahun 2020 serta terfokus pada 34 Provinsi di Indonesia.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, memudahkan menelaah, dan memahami pokok-pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya, maka terlebih dahulu peneliti memaparkan pengertian yang ada dalam judul skripsi di atas. Adapun istilah-istilah yang akan penulis kemukakan dalam judul adalah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

- 1) Jumlah penduduk adalah orang yang mendiami suatu tempat dalam wilayah tertentu dengan tanpa melihat status kewarganegaraan yang dianut oleh orang tersebut.⁹
- 2) Tingkat pengangguran terbuka adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja

⁹ Saharuddin Didu, “ Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak”, *Jurnal Ekonomi-Qu*, Vol. 6, No. 1, thn 2016, hal 106

yang mencari pekerjaan, baik yang sedang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang sudah bekerja sebelumnya.¹⁰

- 3) Wakaf adalah tindakan hukum wakif untuk menahan harta wakafnya dan diambil manfaatnya dalam jangka waktu selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dipergunakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat umum. ¹¹Jadi jumlah tanah wakaf adalah keseluruhan jumlah tanah yang diwakafkan dalam jangka waktu yang telah disepakati yang dipergunakan untuk kepentingan ibadah ataupun kesejahteraan masyarakat umum.
- 4) Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang berakibat bertambahnya produksi barang ataupun jasa dalam masyarakat, perkembangan perekonomian ini disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang mengalami peningkatan dalam kuantitas maupun kualitasnya.¹²

2. Definisi Operasional

- 1) Jumlah penduduk adalah keseluruhan penduduk yang menempati suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

¹⁰ Syamsul Arifin dan Yoyok Soesatyo, *Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Konsumsi Dalam Bingkai Kesejahteraan Masyarakat...*, hal 26

¹¹ Muhammad Syafi'i, *Arah Manajemen Wakaf: Tradisional Modern*, (Jember: CV Pustaka Abadi, 2020). hal. 2-3

¹² Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). hal. 9

Dalam penelitian ini jumlah penduduk yang dimaksud yaitu jumlah penduduk yang terdapat pada 34 Provinsi di Indonesia periode 2020.

- 2) Tingkat pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena adanya selisih antara jumlah lowongan kerja dengan jumlah angkatan kerja.

Dalam penelitian ini tingkat pengangguran terbuka yang dimaksud yaitu banyaknya jumlah pengangguran terbuka pada 34 Provinsi di Indonesia periode 2020.

- 3) Jumlah tanah wakaf adalah keseluruhan tanah wakaf yang terdapat di wilayah dan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam penelitian ini jumlah tanah wakaf yang dimaksud yaitu banyaknya jumlah tanah wakaf yang terdapat pada 34 Provinsi di Indonesia periode 2020.

- 4) Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu.

Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi yang dimaksud yaitu data produk domestik regional bruto (pdrb) yang terdapat pada 34 Provinsi di Indonesia periode 2020.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini dibuat sedemikian rupa agar untuk kedepannya terdapat kejelasan arah dalam pembahasan masalah, untuk itulah disusun sistematika yang terdiri 6 (enam) bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, diuraikan beberapa subbab, yaitu: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, diuraikan secara ringkas beberapa teori yang didapat dari berbagai referensi yang masih berhubungan erat dengan variabel yang dibahas guna mendukung penelitian. Teori jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, jumlah tanah wakaf serta pertumbuhan ekonomi. Pada bab ini juga diuraikan terkait kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, diuraikan beberapa subbab terdiri dari : pendekatan dan jenis penelitian, populasi, teknik sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi data, yang dalam penelitian ini data yang dideskripsikan adalah data jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, jumlah tanah wakaf serta produk domestik regional bruto (pdrb). Selain deskripsi data, dalam bab ini juga diuraikan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian terkait kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan serta beberapa saran dari peneliti untuk pihak-pihak yang berkepentingan.